

CATATAN LAPANGAN

I. PANDANGAN PARA FUNGSIONARIS OKP

1.1. Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (Drs. Dadang Hilman, dkk)

(Hasil Wawancara)

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) menilai pendidikan politik sebagai hal yang penting bagi pertumbuhan organisasi. Penilaian ini didasarkan pada filosofi pendidikan politik, tujuan, keterkaitannya dengan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) dan Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982 maupun dari sudut pandang esensi pengembangan generasi muda.

Dalam tubuh AMPI pendidikan politik didasarkan atas filosofi kesamaan dan keutuhan, baik persepsi, apersepsi, maupun konsepsi tentang kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kaitan ini, pendidikan politik merupakan upaya menanamkan, menumbuhkan dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab kebangsaan.

Proses pendidikan politik dipandang sebagai refleksi semangat dan tekad yang terwujud dalam tekad karya dan perjuangan politik. Sehingga yang menjadi penekanan

pendidikan politik adalah sentuhan nurani yang dapat menumbuhkan sikap, tingkah laku dan ungkapannya.

Dilihat dari segi tujuannya, pelaksanaan pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran hidup bernegara. Dalam konteks pembangunan nasional, pendidikan politik merupakan bagian dari cita-cita pembangunan nasional, yakni membangun manusia seutuhnya. Oleh karena itu pendidikan politik dipandang perlu dalam menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta tanggung jawab selaku anggota organisasi dan warga negara, meningkatkan disiplin pribadi, sosial dan nasional serta peningkatan pemahaman ideologi Pancasila dan UUD 1945. Secara spesifik, pendidikan politik dipandang perlu untuk membina anggota agar mentaati konsensus normatif, keteraturan dan keselarasan hidup bermasyarakat dalam rangka mencapai tujuan organisasi, yang biasanya dinyatakan dalam deklarasi, kesepakatan maupun kemufakatan.

Berdasarkan tujuan di atas, materi pendidikan politik diorganisir dengan cakupan materi sebagai berikut :

1. Kesadaran, kepatuhan dan ketaatan kepada moral, agama, bangsa dan negara.
 2. Apresiatif terhadap lingkungan keluarga dan masyarakat.
- Secara sederhana, materi pendidikan politik bertumpu pada

pembinaan kesadaran berideologi.

Untuk mencapai tujuan tadi, kegiatan yang dapat mendinamisir sikap cinta tanah air, cinta bangsa dan aktivitas yang dapat menebalkan nasionalisme dan patriotisme terus dikembangkan. Sehingga disamping silabus formal (acuan pendidikan politik), diterapkan pula pendekatan persuasif dan edukatif.

Dalam konteks pendidikan secara makro, proses pendidikan politik dipandang sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 2 tahun 1989. Benang merah yang menghubungkan keduanya terletak pada adanya toleransi yang luas akan hak memperoleh pengajaran sebagai implementasi dari cita-cita bangsa dan negara (mencerdaskan kehidupan bangsa). Sebab substansi pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Sehingga pemerintah berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

Dilihat dari isi pesan Undang-undang No. 2 tahun 1989, pendidikan politik memiliki sasaran sebagai berikut:

1. Membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa
2. Berbudi luhur
3. Berpartisipasi aktif dan kreatif dalam mensukseskan

pembangunan bangsa

Hal ini merupakan potensi untuk bersama-sama meningkatkan kualitas masyarakat.

Pendidikan politik sebagai proses sosialisasi nilai secara tegas diungkapkan Instruksi Presiden No. 12 tahun 1982. Proses ini dinilai penting agar sosialisasi nilai Pancasila dan UUD 1945 terarah dan terencana dengan menggunakan acuan formal yang seragam.

Untuk melakukan pembinaan nilai secara sistematis, keluarga, masyarakat dan pemerintah dipilih sebagai jalur-jalur pembinaan. Namun demikian AMPI, menilai unit terkecil (keluarga) merupakan jalur yang paling efektif. Dengan optimalisasi ketiga jalur ini diharapkan terbinanya kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan cita-cita bangsa. Untuk mencapai sasaran ini, materi pendidikan politik yang dikembangkan meliputi :

1. Arti kesatuan dan persatuan
2. Penanaman sikap toleransi
3. Cinta tanah air
4. Berwawasan nusantara dan ketahanan nasional
5. Memiliki kewaspadaan nasional

AMPI menilai, pembinaan kesetiakawanan (semangat) dan peningkatan pemahaman tentang kemajemukan dalam

memperkokoh integrasi merupakan hal yang esensial dalam pendidikan politik.

Sejalan dengan pengembangan materi tadi, nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, rela berkorban dan aspek idealisme merupakan nilai-nilai politik yang diharapkan berkembang melalui proses pendidikan politik yang dijalankan. Untuk mendukung maksimalisasi pencapaian sasaran ini, AMPI mensyaratkan bahwa batas usia peserta pendidikan politik adalah 15 tahun, di samping memiliki kecukupan dipandang dari sisi psikis dan psikologis.

Selain filosofis tujuan, keterikatan dengan UUSPN dan Inpres NO,12 tahun 1982, pendidikan politik memiliki arti penting jika dilihat dari esensi pengembangan generasi muda. Pola pengembangan yang dinilai tepat adalah mengintegrasikan proses pendidikan politik dengan instansi terkait. Kegiatan ini diarahkan pula sehingga menjadi pengembangan bakat, kepribadian, sehingga mampu berprakarsa sebagai pribadi mandiri yang pada gilirannya meningkatkan mutu dan kemampuannya secara optimal.

Pola ini pun perlu didukung oleh media yang handal, baik media formal (lembaga pendidikan/sekolah) maupun media informasi/luar sekolah seperti kursus, pelatihan dan media lainnya. Melalui pemanfaatan media ini, pendidikan

politik diharapkan mampu menjadi pengantar bagi tercapainya kualitas generasi muda yang dapat lebih berperan dalam kegiatan pembangunan di samping terjadi peningkatan kualitas dirinya. Oleh karena itu, pendidikan politik diharapkan mampu berperan dalam :

1. Memupuk rasa kebangsaan, kecintaan dan rasa memiliki bangsa dan negara.
2. Mempertebal semangat pengabdian dan kesiapan untuk membela dan mempertahankan bangsa dan negara.
3. Memupuk rasa keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Jika pendidikan politik dipandang sebagai proses, maka kepeloporan merupakan jiwa semangat yang dinilai menentukan dalam Organisasi Kemasyarakatan Pemuda seperti AMPI. Sejumlah nilai yang diidentifikasi sebagai komponen kepeloporan antara lain kebangsaan, kejuangan, idealisme, patriotisme, keberanian, keterbukaan, pengambilan keputusan, keteladanan, inovatif, kreatif, etos kerja, percaya diri dan ketangguhan.

Asas kebangsaan dalam AMPI dimaksudkan sebagai pola sikap dan pola tindak untuk mencapai persatuan dan kesatuan serta perpaduan dari pola kehidupan yang berdasarkan wawasan nusantara. Berkenan dengan kondisi wawasan kebangsaan dewasa ini, AMPI berpendapat relatif

baik, walaupun di beberapa bagian masih ada gejala penampakan fanatisme etnik.

Berbeda dengan nilai kebangsaan, nilai kejuangan dipahami sebagai disiplin, tanggung jawab serta semangat, tekad tinggi, berani berkorban untuk dan atas cita-cita organisasi yang diikutinya. Nilai ini biasanya diwujudkan dalam :

1. Penugasan-penugasan program organisasi
2. Pelatihan dasar kepemimpinan
3. Latihan dasar kemiliteran

Dengan kata lain, nilai kejuangan biasanya dimanifestasikan dalam keterpanggilan diri secara bertanggung jawab apabila ada tugas/kegiatan yang bersentuhan dengan kemasyarakatan.

Diakui bahwa dalam pengembangan nilai kejuangan dalam AMPI memiliki kendala dan faktor pendukung tersendiri. Budaya primordialisme dan peningkatan kebersamaan merupakan beberapa kendala dalam pengembangan nilai ini. Adapun yang menjadi faktor pendukungnya antara lain :

1. Disepakatinya norma-norma yang mempunyai ruang lingkup nasional, antara lain Pancasila sebagai satu-satunya asas.

2. Rasa sepenanggungan, kesetiakawanan sosial, gotong royong dan lain-lain.

Berkenaan dengan idealisme generasi muda dewasa ini, menilai masih baik. AMPI menambahkan, disamping idealisme, kompetensi lain yang dituntut adalah kemampuan untuk mengidentifikasikan masalah disamping kemampuan untuk mengembangkan kemandirian. Demikian pentingnya idealisme bagi organisasi, AMPI melakukan terobosan-terobosan dalam hal pengembangan aspek ini antara lain dengan menciptakan peluang yang kondusif bagi pengungkapan gagasan-gagasan tanpa halangan, baik psikologis maupun politik dengan menstimulirnya melalui kegiatan-kegiatan yang menuntut gagasan segar dan orisinal.

Disamping ketiga hal tadi, patriotisme merupakan nilai penting dalam pengembangan generasi muda. Patriotisme dimaksudkan sebagai semangat pengabdian dan kesiapan untuk membela organisasi dari segala bentuk ancaman yang dapat menghancurkan eksistensi organisasi. Konsepsi mikro ini, berakar pada rasa kecintaan dan kebanggaan terhadap organisasi yang dilandasi kesadaran tinggi untuk terlibat dalam seluruh aktivitas organisasi.

Berkenaan dengan kondisi patriotisme dewasa ini, AMPI masih menilai perlu dorongan dan bimbingan secara

profesional, dan rasional karena tidak cukup bermodalkan keberanian saja. Oleh karena itu pemupukan daya analisis dan daya kritis merupakan dua aspek yang perlu mendapat perhatian.

Demikian pula halnya dengan keterlibatan generasi muda dalam hal menentukan keselamatan bangsa dan negara kondisinya dinilai baik dengan melihat semangat pengabdian dan pengorbanan serta tanggung jawab dan sikap sosial. Yang terpenting adalah peluang untuk melakukan hal itu, sehingga generasi muda merasa terpancang untuk mengekspresikannya.

Dalam hal kedisiplinan, kesadaran generasi muda masih perlu ditingkatkan termasuk penataan situasi yang sangat mempengaruhi kondisi ini. Kendati demikian, generasi muda masih memiliki rasa bangga akan kebudayaan nasional yang relatif baik kendati perlu diciptakan suasana yang memungkinkan apresiasi. Diakui bahwa, kadang-kadang generasi muda berada dalam kondisi yang dihadapi. Sehingga akar budayanya perlu dimantapkan dan diaktualisasikan kembali.

Adapun menyangkut kondisi keberanian generasi muda dewasa ini AMPI masih baik, apabila organisasi mampu mengembangkan interaksi dan interrelasi yang komunikatif

dan dialogis. Namun dalam hal keberanian generasi muda dalam hal pengambilan keputusan AMPI menilai relatif bersifat ragu-ragu, bahkan kadang-kadang dipengaruhi kekuatan eksternal. Hal ini diakibatkan oleh rasa paternalisme yang masih berpengaruh kuat. Oleh karena itu, AMPI berpendapat self confidence generasi muda mesti terus dipupuk.

Kendati masih terdapat kecenderungan emosional, keberanian generasi muda dalam hal mengajukan koreksi melalui OKP masih dinilai baik. Namun lemahnya konsep diri yang dimiliki, berakibat kepada lemahnya argumen-argumen yang diajukan. Kelemahan dalam aspek ini telah mengakibatkan pula lemahnya daya inisiatif dan kurang berani mengambil resiko, kecuali kelompok pemuda mahasiswa yang masih memiliki moral force.

Menanggapi isu keterbukaan yang hangat dibicarakan belakangan ini, AMPI menganggap bahwa keterbukaan nampak dalam sikap toleransi yang tinggi, mau mendengar pendapat dan koreksi disamping mau mengatakan apa adanya namun tetap berpegang pada sikap moral dan tanggung jawab. Sikap ini akan terpantul dari tindakan atas nama lembaga yang benar-benar transparan tanpa reserve, berupa vested interest.

Demikian pentingnya nilai keterbukaan dalam OKP, AMPI menilai setiap OKP harus memuat program yang mampu mendorong tumbuhnya kondisi ini. Program dimaksud harus mengarah pada pembentukan sikap mental, disiplin, toleransi, misalnya program pelatihan pengkaderan, latihan manajemen kepemimpinan dan lain-lain. Pada gilirannya, program ini akan menjadi wahana generasi muda dalam mengembangkan potensi internal dan eksternalnya serta mengurangi sikap introvert dan eksklusifisme.

Pengembangan iklim keterbukaan dewasa ini dinilai baik karena telah menumbuhkan kontrol sosial khususnya dalam mekanisme kepemimpinan OKP. Untuk mendukung upaya ini, segi kontinuitas dan bidang advokasi perlu terus ditingkatkan. Selain berdampak terhadap kontrol sosial, hembusan iklim ini pun memberikan pengaruh terhadap corak komunikasi antar etnis dan sportifitas generasi muda, khususnya dalam kehidupan OKP.

Dalam upaya mengembangkan keterbukaan, AMPI menempatkan keteladanan sebagai salah satu faktor pendukung yang memiliki arti penting. Sikap ini bertumpu pada kemampuan untuk menjadi panutan, disegani, memiliki kemampuan, toleran, demokrat, tegas, bertanggung jawab, berani, bijaksana dan mampu melihat ke depan. Selain

dipengaruhi pula oleh lingkungan. Selain itu, sikap mementingkan diri sendiri, telah mengakibatkan semakin lunturnya sikap mental ini.

Berkenaan dengan inovatif, AMPI berpendapat bahwa sikap ini berkaitan dengan keuletan dan ketangguhan, progresif, tekun, memiliki kemampuan merencanakan, berinisiatif dan mampu berpikir guna mewujudkan harapan-harapannya. Keadaan ini tidak bisa dilepaskan dari kepercayaan kepada diri sendiri serta kepuasan akan hasil usahanya sendiri. Sikap dialogis, komunikatif, kompetitif, analitis, kritis demokratis dan terbuka merupakan faktor-faktor pendorong pembinaan inovasi. Sedangkan apriori antar pengurus, otoriter, instruktif dan paternalistik merupakan faktor-faktor penghambat pembinaan inovasi.

Disadari bahwa sikap inovatif akan berampak positif bagi pembinaan kreatifitas generasi muda. Kendati masih dinilai baik kondisi kreativitas generasi muda ini masih menampakkan inkonsistensi. Sisi idealisme generasi muda merupakan potensi internal yang mendorong bangkitnya kreativitas. Sementara ketidakpercayaan secara penuh dari lembaga OKP yang bersangkutan, tidak terbukanya manajemen dan tingkat konflik internal yang tinggi serta

kepemimpinan yang statis, apatis dan pesimis merupakan faktor-faktor penghambat kreatifitas. Untuk mengatasi masalah ini, generasi muda perlu didinamisir sehingga motivasinya dapat dibangkitkan. Disamping suasana OKP sendiri dirancang sedemikian rupa sehingga menantang kreativitas generasi muda.

Erat kaitannya dengan kreativitas adalah etos kerja. Etos kerja dipahami sebagai sikap, tekad dan semangat kerja dalam mengaktualisasikan potensi diri agar lebih produktif dan memiliki kinerja tinggi. Kendati masih dinilai baik, kondisi etos kerja generasi muda perlu ditingkatkan dengan dukungan berbagai pihak. Di dalam suatu OKP, persepsi yang jelas tentang fungsi dan tugas yang bersangkutan merupakan faktor pendorong etos kerja. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain :

1. Suasana yang tidak dapat menciptakan kegairahan kerja
2. Budaya kerja yang ada dalam lingkungan organisasi (pengurus) lemah
3. Sikap tak acuh terhadap tugas dan fungsi organisasi

Sisi lain dari etos kerja adalah keuletan dan ketangguhan disamping percaya diri. Keuletan merupakan akumulasi keteguhan atas tugas yang diemban dan ketangguhan yang dimiliki guna menyelesaikan tugas-tugas

dan kewajiban-kewajiban organisasi. Kendati masih dinilai baik, namun potensi-potensi ini masih harus terus dibina sehingga mencari ciri kepemimpinan OKP. Kompetensi-kompetensi ini diyakini hanya akan tumbuh apabila generasi muda dibina, kecakapannya, keahlian dan dilibatkan dalam perumusan kebijakan kepemudaan sehingga kritisisme generasi muda terlatih.

Untuk mendinamisir ketiga potensi diatas, mobilitas merupakan kompetensi lain yang dibutuhkan. Kompetensi ini berkenaan dengan kemampuan dan kesediaan menggerakkan perangkat organisasi dalam mengadakan perubahan, pembaharuan dan penyempurnaan. Sebagai alat mobilitas sosial OKP berperan sebagai wadah penggerak partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mewujudkan cita-cita pembangunan juga sebagai agent of change dan mendinamisir aspirasi masyarakat. Beberapa unsur yang dapat memelihara mobilitas antara lain :

1. Kebersamaan antar pengurus
2. Terpeliharanya visi, persepsi pengurus tentang cita-cita dan tujuan negara
3. Kinerja organisasi
4. Dukungan sarana/fasilitas

Sementara tentang ke-OKP-an, baik perundangan maupun

kelembagaan, AMPI menilai kondisinya sudah menunjang bagi pembinaan OKP, kendati masih menuntut kerja keras para pengurus dalam mengoptimalkan segenap potensi yang dimiliki organisasi.

Berkenaan dengan Undang-undang No. 8 tahun 1985, AMPI menilai tujuan yang digariskan undang-undang ini menempatkan OKP dalam posisi yang strategis. Seperti nampak dalam sasaran umumnya, OKP diharapkan mampu memantapkan ideologi dan sikap mental dan perilaku etis dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini ditegaskan dengan sasaran khususnya memantapkan legalitas formal eksistensi ormas-ormas, bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ditata dan dibangun berdasarkan ideologi Pancasila.

Sama halnya dengan tujuan, penegasan undang-undang ini tentang landasan OKP, baik normatif maupun konstitusional, yang digunakan untuk perumusan kegiatan organisasi, yang dirumuskan dalam bentuk konsensus dan komitmen intern organisasi yang disepakati dalam organisasi yang bersangkutan.

Adapun tentang asas dan arah OKP AMPI menyatakan asas merupakan dasar atau pedoman organisasi sedangkan arah merupakan acuan pokok bagi kehidupan dan pengembangan

operasionalisasi OKP. Secara umum asas dan arah OKP adalah turut menciptakan, memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang dinamis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu syarat terlaksananya kemajuan menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan asas dan arah tadi, mekanisme kerja OKP bisa digariskan. Keterpaduan kerja yang tergambar dalam sistem, unit komando, formulasi tujuan, spesifikasi, pembuatan program dokumentasi dan pengendalian. Namun bagi AMPI, mekanisme pengambilan keputusan misalnya menempuh langkah-langkah berikut :

1. Mendefinisikan masalah
2. Menghimpun data
3. Menentukan alternatif
4. Keputusan
5. Pemantauan
6. Evaluasi

Sementara dalam pelaksanaan program OKP ditempuh langkah-langkah berikut :

1. Penyampaian/pengusulan rencana program oleh biro
2. Dibahas oleh biro yang bersangkutan
3. Dirapatkan dalam rapat pleno
4. Penetapan anggaran biaya

5. Pelaksanaan dan monitoring

6. Evaluasi

Secara keseluruhan AMPI menilai keberadaan UU No. 8 tahun 1985 memiliki keunggulan dan kelemahannya sendiri. Melalui UU tersebut, perwujudan ormas yang mampu memberikan pendidikan kepada warga negara RI bagi pemantapan kesadaran dan motivasi serta terbentuknya ormas yang mandiri semakin terarah. Sedangkan kelemahannya antara lain dalam aplikasinya yang tidak selamanya didukung oleh potensi organisasi yang handal.

Secara kelembagaan legalitas formal/sosial, sarana dan prasarana serta massa anggota merupakan potensi yang dimiliki OKP. Adapun yang menjadi kendala antara penonjolan diri dan pikiran dari sumber dan asal masing-masing organisasi masih sering ditemui disamping kekurangan fasilitas. Namun disadari bahwa penonjolan kepentingan kelompok dan lemahnya mekanisme kontrol organisasi merupakan kendala yang paling dominan.

Aspek lain yang mempengaruhi kehidupan OKP adalah lingkungan sosial. Secara keseluruhan, semangat gotong royong, sikap silih asih, silih asah dan silih asuh serta primodialisme masih merupakan ciri lingkungan sosial. Beberapa faktor pendorong yang berasal dari lingkungan

antara lain :

1. Semangat dan tekad anggota berupa sense of belonging
2. Pembinaan dari Pemda
3. Legalitas dari orpol bagi OKP yang ada keterkaitan secara historis.

Sedangkan yang menjadi kendalanya adalah kemandirian dalam menentukan sikap, yang lebih menampakkan ketergantungan di samping disiplin diri para fungsionaris yang masih konservatif. Dari banyak kendala, kendala berikut merupakan yang paling dominan :

1. Kemampuan pembiayaan baik rutin/program, subsidi yang diterima dari Pemda
2. Penghimpunan dana dari anggota
3. Lemahnya pemahaman landasan perjuangan organisasi
4. Mekanisme organisasi belum efektif

1.2. Komite Nasional Pemuda Indonesia (Drs.Yudi Priyadi,S.H., Agus Salide, dkk)

(Hasil Wawancara)

Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (selanjutnya disingkat KNPI) menilai pendidikan politik sebagai proses penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga KNPI mengaitkan langsung antara pendidikan politik dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 dengan Pancasila sebagai dasar falsafah negara dijadikan sebagai filosofi pendidikan politik. Pemilihan Pancasila sebagai landasan filosofis pendidikan politik didasarkan pada pemikiran bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan tuangan hati nurani dan sifat khas bangsa yang telah tumbuh dan berkembang melalui proses sejarah yang panjang dan berasal dari kodrat budaya yang telah menjadi milik seluruh rakyat.

Dalam pandangan KNPI, pendidikan politik bertujuan menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Sedangkan bagi OKP pendidikan diperlukan dalam rangka membangun visi dan persepsi yang

sama dari berbagai OKP yang memiliki latar belakang aspirasi politik yang berbeda-beda dalam rangka menunjang stabilitas nasional serta turut memperlancar usaha pencapaian cita-cita bangsa melalui pembangunan nasional. Tujuan ini dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan rumah tangga OKP, kebijakan program organisasi dan kerjasama serta koordinasi antar OKP.

Untuk mencapai tujuan di atas, materi pendidikan politik mencakup pembentuk watak dan kepribadian serta penanaman kesadaran dan pengetahuan tentang nilai, sikap dan tingkah laku, keterampilan dan motivasi. Materi ini disajikan melalui kegiatan ceramah, diskusi, simulasi, kegiatan seni dan olah raga, visualisasi, keteladanan dan aktivitas berorganisasi secara langsung.

Dipandang dari Undang-undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan politik merupakan bagian dari proses mencerdaskan kehidupan bangsa.

Bagi KNPI kelahiran Inpres No. 12 tahun 1982 dinilai penting artinya. Selain dilatarbelakangi oleh motivasi yang jelas, kelahiran Inpres ini memberikan pedoman yang baku tentang landasan, jalur, target maupun materi pendidikan politik bagi generasi muda.

Mengacu kepada Inpres No. 12 tahun 1982, KNPI

berpendapat bahwa target yang ingin dicapai melalui pendidikan politik adalah:

1. Perasaan ikut memiliki tanah air, bangsa dan negara
2. Perasaan mempunyai kewajiban untuk membela tanah air, bangsa dan negara
3. Berani untuk mengoreksi diri

Singkatnya melalui pendidikan politik diharapkan terbentuk jiwa dan semangat pengabdian yang tinggi kepada tanah air, bangsa dan negara.

Untuk mencapai sasaran tadi, materi yang harus disajikan antara lain :

1. Penanaman kesadaran berideologi, berbangsa dan bernegara
2. Kehidupan dan kerukunan hidup beragama
3. Motivasi berprestasi
4. Pengamalan kesamaan hak dan kewajiban, keadilan sosial dan penghormatan atas harkat dan martabat manusia
5. Pengembangan kemampuan politik dan pribadi untuk mewujudkan partisipasi politik
6. Disiplin pribadi, sosial dan nasional
7. Kepercayaan kepada pemerintah
8. Kepercayaan kepada pembangunan yang berkesinambungan

Pengembangan materi di atas, berintikan pembinaan

nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 sebagai nilai sentral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Adapun yang menjadi peserta pendidikan politik, setiap generasi muda (0 - 30 tahun) berhak menjadi peserta pendidikan politik. Ketiga jalur pendidikan politik yakni keluarga, masyarakat dan pemerintah harus dimanfaatkan dalam proses ini.

Berkenaan dengan kepeloporan OKP, KNPI berpandangan sebagai berikut:

Menyangkut semangat kebangsaan, KNPI menganggap sebagai pedoman dalam setiap program OKP. Berkenaan dengan kondisi asas kebangsaan dewasa ini, KNPI menilai masih perlu peningkatan, sehingga OKP tidak kehilangan jati diri.

OKP sebagai wahana pengabdian memerlukan pemuda yang memiliki kejuangan yang tinggi sehingga mampu mewujudkan ketahanan nasional yang mantap dan berjuang tanpa pamrih. Untuk mewujudkan semangat ini, kerja sosial yang non profit perlu digalakkan.

Kendati dalam skala yang beragam, semangat kebangsaan dan idealisme masih ada di setiap jiwa generasi muda. Namun pembinaan nilai ini menghadapi kendala berkenaan dengan tuntutan kebutuhan pribadi dan semangat

konsumerisme yang melanda masyarakat akibat perubahan dan kemajuan sebagai hasil pembangunan.

Demikian pula halnya dengan idealisme generasi muda. Semangat ini dinilai masih cukup tinggi terutama dikalangan mahasiswa. Untuk mengembangkan semangat ini OKP harus menjadikan dirinya sebagai latihan artikulasi aspirasi secara kondusif mengakomodasi pemikiran kritis secara bertanggung jawab.

Di samping idealisme, patriotisme generasi muda terungkap dalam hal keberanian mengemukakan pendapat. Hal ini dikarenakan pemuda masih dapat dikategorikan masih relatif murni terhadap kepentingan dalam tatanan sosial yang ada sehingga ia mampu melihat kekurangan yang ada secara objektif dan berani mengartikulasikannya. Pemuda concern tentang masalah keadilan dan kebenaran. Pemuda selalu siap untuk melakukan bela negara. Kapan saja dibutuhkan dapat dilihat dari minat pemuda menjadi rakyat terlatih atau melalui pendidikan kemiliteran dalam tubuh OKP.

Namun demikian ketaatan generasi muda dalam mentaati peraturan masih rendah. Hal ini dikarenakan tidak mendapat contoh yang baik dari lingkungannya dan belum tegaknya aturan sebagaimana mestinya. KNPI pun menilai kebanggaan

generasi muda terhadap budaya bangsa kurang, dan masih menganggap budaya barat lebih unggul.

Pengembangan gagasan generasi muda dalam OKP masih terbatas. Karena setiap OKP didasari oleh orientasi dan ciri-ciri yang spesifik serta tata aturan yang sudah baku. Demikian pula halnya dalam pengambilan keputusan, yang masih banyak ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan politis dan kepentingan eksternal. Sedangkan keberanian generasi muda dalam mengajukan koreksi akan bergantung kepada gaya kepemimpinan yang diterapkan ketuanya.

Berkenaan dengan kemauan berinisiatif juga masih dapat digolongkan rendah. Karena masih tampak kecenderungan mengandalkan pimpinan atau menuruti sesuatu yang sudah baku. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan untuk menghindari resiko.

Berkenaan dengan keterbukaan, KNPI menilai mutlak diperlukan dalam pengelolaan organisasi sehingga kondusif bagi pengembangan diri anggota-anggotanya. Untuk mengembangkan potensi ini forum-forum yang dialogis mutlak diperlukan. Dalam suasana keterbukaan, kontrol sosial akan menentukan suasana yang demokratis pada setiap pengambilan keputusan dan kebijakan organisasi.

Berkenaan dengan keteladanan, KNPI menilai

keteladanan yang berciri ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso dan tut wuri handayani mutlak diperlukan. Sikap dan perilaku para pemimpin OKP dipandang sebagai sumber keteladanan. Sedangkan konsistensi para pemimpin dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi pasang surutnya keteladanan dalam kepemimpinan.

Untuk mendinamisir kehidupan OKP daya inovasi anggota sangat diperlukan. Sebuah OKP yang tidak ingin mandeg dan tetap aktual serta diminati pemuda harus tetap melakukan pembaharuan-pembaharuan. Inovasi pemuda dalam OKP diaktualisasikan dengan lahirnya gagasan-gagasan baru dan perbedaan pendapat atau pandangan dalam menganalisis suatu masalah. Tuntutan keadaan dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri terhadap perkembangan jaman dianggap sebagai faktor pendorong pembinaan sikap inovatif, sedangkan sikap otoriter dan konservatisme para fungsionaris merupakan penghambat pengembangan sikap ini.

Mengingat fasilitas yang kurang lengkap, kreativitas merupakan sikap mental yang sangat mendukung kemajuan OKP. Sementara orientasi pengurus dan muatan program yang lebih cenderung kepada masalah-masalah politik dinilai menghambat pengembangan kreativitas pemuda di bidang-bidang lain. Untuk mengembangkan potensi ini

dibutuhkan suasana yang kondusif, kebebasan mengemukakan gagasan dan dukungan pimpinan. Sementara sikap otoriter dari pimpinan dan orientasi program yang tidak sesuai dengan minat dan bakat merupakan faktor penghambat pengembangan sikap ini. Untuk mengatasi masalah ini menuntut pembina untuk memberikan fasilitas yang memadai dan penciptaan persaingan yang sehat.

Selain kreativitas, OKP yang ingin maju dan menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien memerlukan etos kerja yang tinggi dari para anggota dan pimpinannya. Padahal etos kerja pemuda masa kini dinilai sangat rendah, terbukti dengan banyaknya program-program OKP dan sikap masa bodoh dan malas para anggota merupakan faktor penghambat pengembangan etos kerja. Untuk mengatasi masalah ini perlu ditingkatkan pengetahuan dan keterampilan para anggota OKP melalui pelatihan dan pendidikan.

Rendahnya etos kerja dimungkinkan pula oleh kurangnya keuletan, percaya diri dan ketangguhan. Padahal OKP yang bersifat sosial dan pengabdian mutlak memerlukan keuletan, terutama pemimpinnya dalam menjalankan roda organisasi yang kadang-kadang memiliki fasilitas yang terbatas.

Menilai keberadaan UU No. 8 tahun 1985 KNPI menganggap tidak ada masalah. Bahkan lebih dari itu, kehadiran UU tersebut dirasakan memberikan manfaat dalam mengembangkan organisasinya.

Ditanya tentang tujuan OKP menurut UU ini KNPI menjawab bahwa OKP bertujuan mengembangkan kader-kader bangsa yang berkualitas dan mandiri serta berperan aktif dalam seluruh proses pembangunan nasional. Dengan sasaran umum yaitu :

1. Menyalurkan aspirasi para anggotanya
2. Melaksanakan pembinaan dan kaderisasi
3. Sarana komunikasi timbal balik antara anggota/ ormas/pemerintah dan badan perwakilan.

Adapun sasaran khususnya disesuaikan dengan kebutuhan para anggotanya yang memiliki persamaan latar belakang.

OKP berpijak pada landasan umum hak setiap warga negara Indonesia yang berserikat dan berorganisasi. Selain hak untuk berkumpul berdasarkan kesamaan fungsi, profesi dan agama.

Berkenaan dengan arah dan sasaran, KNPI berpendapat sebaiknya OKP diarahkan kepada upaya pemberdayaan infrastruktur politik dan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun menyangkut sasaran khusus biasanya

disesuaikan dengan latar belakang para anggotanya.

Menilai mekanisme kerja OKP, KNPI menganggap terlalu hierarkhis sehingga terkesan lamban dalam bekerja. Dalam pelaksanaan program misalnya, bisa ditempuh langkah-langkah pelaksanaan secara mandiri oleh OKP yang bersangkutan, disamping kerjasama dengan OKP lain yang bersifat partisipatif.

Dalam pelaksanaannya, UU No. 8 tahun 1985 memiliki potensi dan kendala. UU ini memberikan kesempatan bagi OKP untuk berperan sebagai wadah penyalur aspirasi dan wahana untuk berperan serta juga sebagai wahana pengembangan anggotanya. Sedangkan yang menjadi kendalanya adalah sistem pembinaan yang belum baku dan keberadaan OKP yang tidak dapat berperan sebagaimana mestinya, bahkan cenderung bersifat "papan nama". Kendala lain adalah kurangnya pemahaman dan kepedulian unsur pembina kepemudaan dalam melaksanakan peranannya, disamping belum terpadunya program pembinaan kepemudaan dan kelemahan OKP dalam menjalankan fungsinya.

Dipandang dari sudut kelembagaan OKP memiliki beberapa potensi antara lain :

1. Sumber daya manusia pemuda

2. Pendidikan anggotanya yang relatif lebih tinggi dibanding masyarakat lain pada umumnya
3. Jumlahnya yang banyak dan
4. Semangat dan idealisme para anggotanya.

Sedangkan yang menjadi kendala antara lain:

1. Sistem pengorganisasian
2. Proses pengambilan keputusan yang panjang
3. struktur organisasi yang terlalu hierarkhis.

Berkenaan dengan lingkungan sosial budaya OKP, KNPI memiliki nilai cukup mendukung. Penilaian ini didasarkan kepada semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan yang masih kuat berakar di masyarakat. Disamping kondisi sosial politik masyarakat yang menunjang keberadaan OKP sebagai media artikulasi dan sosialisasi kepemudaan. Adapun yang dinilai menjadi faktor penghambat adalah budaya restu/paternalistik dan budaya lapor/sowan. Sedangkan secara struktural peranan infra struktur politik termasuk OKP masih lemah dan berada dalam posisi pinggiran.

1.3. Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan ABRI

(Bambang Budi Asmara, dkk)

(Hasil Wawancara)

Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I FKPPI, menilai pendidikan politik sebagai usaha penting dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai modal utama pengelolaan masyarakat dan negara. Makna pendidikan politik ini seperti diletakan di atas landasan filosofi Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu pendidikan politik memiliki keterkaitan erat dengan akar budaya bangsa karena ia lahir secara berkesinambungan sebagai keharusan yang menjadi kepentingan negara.

Berdasarkan makna seperti diatas, pendidikan politik memiliki tujuan meningkatkan wawasan kebangsaan, kecintaan dan rasa memiliki terhadap negara dan bangsa serta menempa jiwa kepemimpinan dan peningkatan keterampilan yang dapat disumbangkan bagi pembangunan nasional. Sedangkan bagi OKP pendidikan politik diperlukan dalam rangka menanamkan kesadaran OKP terhadap kepentingan-kepentingan negara yang tidak dapat dielakkan.

Untuk mencapai tujuan politik, yang biasanya dirumuskan dalam bentuk pedoman organisasi, dalam

pelaksanaannya akan disajikan sejumlah materi berikut :

1. Wawasan nasional/nusantara
2. Latihan bela negara
3. Latihan pengelolaan administrasi negara
4. Masalah kepemimpinan

Sedangkan menyangkut kegiatannya bisa ditempuh :

1. Training dan kursus-kursus
2. Pengabdian kepada masyarakat
3. Pendalaman nilai-nilai budaya bangsa melalui seminar, diskusi, lokakarya dan lain-lain

Menjawab pertanyaan tentang wujud pendidikan politik menurut Undang-undang No. 2 tahun 1989, FKPPi menjawab dalam wujud pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan melalui pendewasaan dan kulturisasi kehidupan nasional. Dengan sasaran terciptanya kader-kader bangsa yang cerdas dan terampil serta memiliki wawasan yang luas dalam ikut serta mewujudkan tujuan nasional.

Dilihat dari Inpres No 12 tahun 1982 proses pendidikan politik akan berlangsung dalam jalur akademis, jalur non akademis atau organisasi-organisasi kepemudaan dan lembaga-lembaga pemerintahan. Proses ini berusaha mencapai masyarakat/kader-kader bangsa yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya terhadap bangsa dan negara. Untuk

mencapai target ini sudah sewajarnya jika dalam pelaksanaannya mengembangkan materi kepeloporan/keteladanan, keterampilan, wawasan/pengembangan pola pikir dan materi kepemimpinan. Dengan kata lain materi pendidikan politik mendukung pengembangan nilai-nilai kekeluargaan dan kebersamaan.

Berkenaan dengan kedudukan generasi muda dalam pendidikan politik, FKPPi membagi dua kelompok peserta pendidikan politik, yakni kelompok usia 17-35 dan 25-40 tahun. Berdasarkan pembagian ini, pembinaan generasi muda dikembangkan dalam rangka mengikutsertakan secara aktif dalam proses pembangunan nasional dan menanamkan kecintaannya terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Melalui pola pengembangan seperti ini diharapkan tercipta generasi muda yang kreatif, inovatif dan memiliki jiwa kejuangan/kepeloporan.

Berkenaan dengan kepeloporan OKP, FKPPi mengemukakan pandangan-pandangan sebagai berikut.

Nilai kebangsaan sebagai bagian dari kepeloporan harus dijadikan landasan bagi setiap gerak perjuangan OKP. Dalam penilaian FKPPi, sampai sekarang belum terlihat adanya masalah-masalah krusial, kecuali hal-hal kecil sebagai akibat pengaruh budaya luar.

Demikian pula halnya dengan nilai kejuangan yang dinilai masih konsisten mewarisi nilai-nilai leluhurnya. Nilai-nilai kejuangan pemuda dapat diwujudkan dalam :

1. Pengabdian pada masyarakat
2. Peningkatan kualitas diri
3. Menegakkan keadilan dan kebenaran
4. Membela hak-hak rakyat secara prosedural/konstitusional

Pengembangan nilai ini diakui bukan tanpa menghadapi hambatan. Hambatan itu antara lain :

1. Pengaruh budaya luar yang sangat deras
2. Kurang kesadaran akan ketinggian harga diri
3. Masih rendahnya wawasan kejuangan

Sedangkan yang dinilai mendukung pengembangan nilai ini adalah warisan semangat kejuangan leluhur bangsa, disamping nilai-nilai budaya yang sarat dengan dinamika dan kejuangan.

Ditanya tentang kondisi idealisme pemuda dewasa ini FKPPi menilai secara dominan masih tersimpan dalam jiwa dan semangat masing-masing, namun kadang-kadang terkontaminasi oleh faktor-faktor psikologis sebagai akibat logis hidup pada kondisi negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu OKP harus mengambil terobosan dalam hal pengembangan idealisme dengan cara mengembangkan

keberanian mengungkapkan dan menyampaikan gagasan-gagasan yang menyangkut kepentingan rakyat dan kepentingan nasional.

Dalam pandangan FKPPi keberanian ini erat kaitannya dengan patriotisme yang berintikan keberanian untuk berkorban dalam membela kepentingan nasional. Dalam hal keberanian membela kebenaran dan keadilan, dalam kesempatan-kesempatan tertentu masih turut mengambil bagian, terutama mereka yang aktif di organisasi-organisasi kemasyarakatan. Keberanian ini dimungkinkan karena dukungan disiplin dan kebanggaan akan kebudayaan bangsa yang masih tinggi.

Selain keberanian, keterbukaan merupakan faktor penting dalam kehidupan OKP. Bahkan sikap ini dinilai sebagai suatu keharusan yang perlu ditumbuhkembangkan dalam kehidupan OKP. Dalam menunjang pengembangan sikap ini maka pelatihan dan pembiasaan diri untuk menghargai gagasan dan pendapat orang lain perlu dijadikan muatan program OKP. Demikian pula halnya dengan peranan kontrol sosial, dalam hal-hal tertentu masih berkembang cukup baik. Perkembangan perkembangan bertampak ganda. Ia tidak saja menseserasikan hubungan antar etnis dalam suatu OKP tetapi juga berpengaruh sangat positif terhadap

peningkatan kedewasaan dalam berpikir dan bertindak serta menerima kenyataan yang ada.

Berkenaan dengan pengambilan keputusan yang dilakukan di dalam tubuh FKPPi ditempuh langkah-langkah sebagai berikut :

1. Inventarisasi masalah secara baik
2. Rasionalisasi melalui proses diskusi dan musyawarah untuk kemudian diambil keputusan yang paling baik.

Dengan berdasar pada sistem kekeluargaan dan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan didasarkan pada :

1. Kepentingan mayoritas anggota
2. AD/ART
3. Hasil-hasil musyawarah
4. Masa depan kemajuan organisasi

Diakui bahwa keteladanan memang merupakan unsur lain dinilai penting dalam kehidupan OKP. Sikap ini berintikan melatih dan membiasakan diri melahirkan kerja inovatif dan patriotik yang diawali dari diri sendiri. Sikap ini bersumber pada warisan budaya leluhur dan sikap-sikap para pemimpin bangsa yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap perkembangan dan keselamatan negara. Tindakan mana yang dapat dijadikan sumber keteladanan, ia bergantung kepada nilai-nilai agama dan nilai moral

Pancasila yang dijadikan parameter nya. Nilai ini selalu pasang surut karena pengaruh budaya bangsa yang semakin maju dan berkembang serta akibat perubahan sosial lainnya. Pengembangan sikap ini pun masih dihadapkan pada kendala masih rendahnya wawasan keorganisasian dikalangan para anggota OKP, disamping faktor-faktor eksternal lain yang secara langsung berpengaruh terhadap motivasi generasi muda memasuki OKP.

Berkenaan dengan sikap inovatif, FKPPi berpendapat bahwa sebagai suatu bangsa yang mewakili para pemuda, sudah semestinya jika kepemimpinan OKP menampilkan sikap inovatif sebagai karakteristik kepemimpinannya. Pembinaan sikap ini memiliki faktor pendorong dan penghambatnya sendiri. Diantara faktor pendorong itu antara lain :

1. Banyaknya warisan kaya inovatif dari para leluhur bangsa
2. Sikap pemerintah yang terus memacu kecerdasan kehidupan bangsa
3. Jaminan hukum akan kebebasan mengembangkan inovasi dalam kehidupan OKP

Sedangkan faktor-faktor penghambatnya adalah sarana dan prasarana (perangkat keras dan lunak) yang belum memadai disamping dana yang masih terbatas bagi pengembangan OKP.

Seperti halnya sifat inovatif, sikap kreatif harus dijadikan landasan gerak dalam kepemimpinan OKP demi terciptanya peran serta aktif OKP dalam dinamika pembangunan nasional. Beberapa faktor yang dirasakan menghambat munculnya kreativitas pemuda dalam OKP adalah :

1. Keterbatasan pengetahuan dan wawasan yang dimiliki
2. Keterlibatan lembaga kemasyarakatan dan pemerintah dalam mengambil alih pekerjaan yang selayaknya dilakukan oleh pemuda.

Adapun yang menjadi faktor pendorongnya adalah :

1. Semangat yang ada pada setiap jiwa pemuda
2. Dinamika masyarakat berkembang dan maju yang secara otomatis menuntut aktivitas dan kreativitas para pemuda.

Berdasarkan potensi ini beberapa usaha yang perlu dilakukan adalah :

1. Memberi ruang gerak yang agak leluasa terhadap apa yang dilakukan para pemuda
2. Mendorong dan mengembangkan semangat pemuda
3. Melatih dan memberi contoh lahirnya kreativitas dikalangan pemuda.

Sedangkan berkenaan dengan etos kerja FKPPi berpendapat bahwa etos kerja mesti dijadikan motivasi

juang demi kemajuan kepemimpinan OKP dan kepemimpinan bangsa, masyarakat dan negara. Untuk mendukung pengembangan sikap ini suasana yang harmonis dan dinamis dalam tubuh OKP disamping merancang program-program yang dapat mendorong semangat pemuda dalam OKP merupakan unsur-unsur yang perlu dikembangkan. Sedangkan yang menghambat munculnya etos kerja antara lain suasana OKP yang kaku dan monoton serta tidak memancing semangat kerja pemuda. Untuk meningkatkan etos kerja perlu ditempuh langkah-langkah berikut :

1. Memberikan kepercayaan dan melaksanakan program kerja OKP
2. Menciptakan suasana yang tidak terlalu kaku dalam menerapkan aturan-aturan organisasi pada para anggota.

Erat kaitannya dengan etos kerja adalah keuletan yang dinilai sebagai salah satu modal utama kehidupan OKP sehingga sikap ini harus tercermin dari setiap tindakan pengurus OKP. FKPPi menilai keuletan pemuda dalam memecahkan persoalan negara dalam partisipasinya cukup membanggakan, terutama para pemuda aktivis OKP, mengingat semakin tingginya kesadaran mereka dalam hidup berbangsa dan bernegara. Beberapa faktor yang dapat mendorong sikap mental ini adalah tingkat tanggung jawab yang dimiliki

terhadap kemajuan diri dan OKP serta tingkat cita-cita yang diemban di masa depan. Sedangkan beberapa faktor yang merintanginya adalah :

1. Program-program OKP yang monoton dan tidak menantang
2. Suasana kehidupan OKP yang kurang harmonis
3. Tidak ada kepercayaan untuk melimpahkan tugas-tugas kepada para anggota OKP

Sedangkan sikap lainnya yang dibutuhkan dalam mengembangkan kepeloporan pemuda dalam OKP adalah percaya diri, ketangguhan dan mobilitas. Percaya diri harus dijadikan modal utama dalam meningkatkan kualitas diri bagi kepemimpinan OKP. Kendati rata-rata cukup menggembirakan, namun batas-batas tertentu, perlu pembinaan dan pengembangan. Sama pentingnya dengan kepercayaan diri adalah ketangguhan yang dinilai sebagai prasyarat yang harus dimiliki oleh pemuda. Sampai saat ini sikap ini masih berkembang cukup wajar. Sedangkan berkenaan dengan aspek mobilitas dalam kepemimpinan OKP masih dimiliki oleh para aktivis OKP.

Berkenaan dengan OKP, baik dilihat dari Undang-undang No. 8 tahun 1985, kelembagaan maupun lingkungan sosial, memberikan pandangan sebagai berikut.

Mengacu pada UU No. 8 tahun 1985 OKP memiliki tujuan

menyalurkan atau menjadi wadah kegiatan, pembinaan, saluran pendapat dan pikiran anggota masyarakat Republik Indonesia. Sasaran umumnya adalah menciptakan masyarakat yang Pancasila dalam kondisi negara yang makmur, adil dan berkedaulatan. Adapun sasaran khususnya adalah terciptanya pribadi masyarakat Indonesia yang cerdas, terampil, beriman dan bertaqwa, sejahtera lahir dan batin berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Berkenaan dengan mekanisme kerja OKP, FKPPi menilai belum berfungsi secara maksimal mengingat masih beragam dan bercampurnya antara tugas-tugas pribadi dan tugas keorganisasian. Meskipun demikian, dalam hal pengambilan keputusan relatif sudah mapan dengan menempuh langkah-langkah berikut :

1. Inventarisasi masalah
2. Memusyawarakannya
3. Menyesuaikan dengan pedoman
4. Mengambil keputusan.

Dalam aplikasinya UU No. 8 tahun 1985 mengandung potensi dan kendala. Disamping kesempatan yang luas untuk meningkatkan aktivitas diri dalam kepemimpinan OKP demi kepentingan negara dan bangsa, juga yang terpenting adalah kepercayaan pemerintah dalam memberikan kebebasan untuk

mengembangkan jati diri pemuda. Sedangkan kendalanya adalah :

1. Masih adanya aktivis OKP yang berpendidikan rendah
2. Tugas-tugas pemuda yang beragam
3. Masih adanya interes pribadi dikalangan aktivis OKP

Diluar ketiga hal tadi kendala yang terkadang terasa dominan yaitu dominannya peran serta pemerintahan dalam pengembangan OKP.

Apabila dilihat secara kelembagaan, keberadaan OKP memiliki potensi berupa jaminan negara (hukum) untuk berserikat dan berorganisasi, di samping jaminan pemuda yang cukup besar. Sedangkan ketergantungan kepada pemerintah dirasakan sebagai kendala bagi peningkatan kemandirian dan kemajuan OKP.

Sedangkan dari aspek lingkungan sosial keberadaan OKP memiliki potensi karena masyarakat yang sangat mendukung dan sangat membutuhkan tumbuh dan berkembangnya OKP, selain antusiasme pemuda dalam memasuki keanggotaan OKP. Sedangkan yang menjadi kendalanya adalah masih rendahnya kualitas input yang diakibatkan oleh masih kurang baiknya kondisi sosial ekonomi masyarakat. Hal ini berdampak pada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan anggota.

1.4. Himpunan Mahasiswa Islam (Drs. Aman Romansyah,
Abdul Rahman Al-Hakim, dkk)
(Hasil Wawancara)

Pendidikan politik merupakan aspek penting tidak saja untuk kepentingan organisasi saja, tetapi juga untuk kelangsungan hidup bangsa. Hal ini dikarenakan pendidikan politik memiliki dasar motivasi yang kuat, berupa kepentingan untuk mempertahankan negara Republik Indonesia dan memperbaiki harkat dan martabat rakyat. Khusus bagi HMI landasan filosofi pendidikan politik adalah ajaran Islam dan realitas ketatanegaraan RI.

Dalam kaitannya dengan akar budaya bangsa, landasan filosofi tadi harus termanifestasikan dalam ruang lingkup akar budaya bangsa yang berketuhanan Yang Maha Esa, kerkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial. Artinya Pancasila merupakan batas dasar (alas) budaya bangsa.

Pendidikan politik paling tidak memiliki dua tujuan, yakni menanamkan nilai-nilai dasar Pancasila di samping menanamkan kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara RI. Sedangkan bagi OKP pendidikan politik

diperlukan dalam rangka memberikan arah organisasi, membina kerangka (sistem) berfikir, sikap dan kerja organisasi sebagai pedoman organisasi. Tujuan ini biasanya dirumuskan dalam anggaran dasar HMI yang menyatakan bahwa "terbinanya insan akademis dan pengabdian yang bernafaskan Islam serta bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Berdasarkan tujuan ini maka materi pendidikan politik memuat (1) nilai-nilai ajaran Islam; (2) nilai-nilai keilmuan (akademis); (3) nilai-nilai kemasyarakatan (kebangsaan); dan (4) organisasi, kepemimpinan dan manajemen. Dengan kata lain, materi pendidikan politik yang diselenggarakan HMI berkenaan dengan keislaman, ketimuran, kemasyarakatan/kebangsaan dan keorganisasian. Untuk mencapai tujuan itu kegiatan yang ditempuh antara lain pendidikan dan latihan serta praktek langsung dalam berbagi aktivitas kemahasiswaan/kemasyarakatan.

Sedangkan menurut Undang-undang No 2 Tahun 1989, pendidikan politik diwujudkan dalam bentuk pendidikan kewarganegaraan. Adapun yang menjadi tujuannya adalah sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara; cinta tanah air/patriotisme dan menjunjung tinggi asas kedaulatan serta persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam pandangan HMI, proses nations and character building serta pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda, dinilai merupakan faktor-faktor yang melatarbelakangi lahirnya Inpres No.12 tahun 1982. Selain dua faktor tadi, TAP MPR No.II/1978 merupakan faktor lain yang melatarbelakangi lahirnya Inpres ini. Mengacu pada ketentuan ini jalur sekolah dan ormas/OKP merupakan jalur-jalur pembinaan generasi muda. Adapun yang menjadi targetnya adalah (1) menyamakan visi dan persepsi ; (2) kesadaran sebagai warga negara yang baik ; (3) persatuan dan kesatuan sesama generasi muda. Untuk mencapai target ini, materi yang dikembangkan dalam proses pendidikan politik meliputi katahunan nasional, wawasan nusantara, UUD 1945, P4 dan GBHN, UU keormasan dan ke-orpolan, sistem pemilu dan lain-lain. Melalui materi ini diharapkan dapat mengembangkan nilai-nilai budaya politik demokrasi, persatuan dan kesatuan, patriotisme dan kejuangan.

Urgensi pendidikan politik dirasakan pula bila dilihat dari kepentingan untuk mengembangkan generasi muda, yang dibatasi 35 tahun. Pengembangan yang dilakukan ditempuh melalui pola pendidikan (latihan dan penataran) dan interaksi/pelibatan langsung. adapun media yang digunakan adalah Ormas/OKP disamping sekolah. Pembinaan

ini dilaksanakan untuk mencapai target: (1) memberikan wawasan berbangsa dan bernegara ; (2) membentuk sikap positif, kritis, inovatif dan demokratis ; serta (3) mempersiapkan calon pemimpin bangsa demi masa depan. Kepeloporan OKP merupakan potensi internal yang harus digerakkan dan termanifestasi dari serangkaian aktivitas OKP. Hal ini hanya mungkin jika atribut-atribut yang menjadi komponen kepeloporan mendapat pembinaan.

Kebangsaan adalah atribut kepeloporan pemuda yang disorot HMI pertama kali. Azas kebangsaan merupakan asas dimana OKP memandang Pancasila sebagai sumber etik dan hukum dalam keorganisasian, kemasyarakatan, berbangsa dan bernegara. Dalam penilaian HMI sampai sejauh ini implementasi asas kebangsaan tidak ada masalah.

Nilai lain yang tak kalah penting dibandingkan kebangsaan adalah asas kejuangan. Nilai kejuangan adalah nilai yang memotivasi dan mengarahkan organisasi dalam mamperjuangkan cita-cita masyarakat nasional sebagai wujud dalam bentuk komitmen dan kiprahnya yang secara konsisten senantiasa berusaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT.

Kendala yang dihadapi dalam mengembangkan nilai kejuangan antara lai kendala waktu yang dimiliki anggota;

keterbatasan dana; dan sistem sosial politik yang kurang adil dan demokratis. Sedangkan sejumlah faktor yang dinilai mendukung pengembangan nilai ini adalah sumber daya mahasiswa, sistem pengkaderan yang relatif mapan dan identitas Islam (mahasiswa Islam).

Berkenaan dengan kondisi idealisme pemuda dewasa ini, HMI menilai identitas pemuda secara empirik cukup memprihatinkan, amat pragmatis, individualistis, oportunistis (tak konsisten), kurang memiliki ketegasan etik dan cenderung anti demokrasi. Hanya sedikit pemuda yang memiliki idealisme. Namun berkenaan dengan rasa memiliki pemuda terhadap HMI dinilai sangat baik sebab didasarkan atas kesamaan ide, cita-cita dan ajaran Islam. Hal ini dimungkinkan karena motivasi yang jelas dalam memasuki HMI, yang pada umumnya ingin berhimpun atas dasar kesamaan ide, cita-cita dan ajaran Islam, membina diri dan perjuangan secara kolektif (melalui organisasi). Sedangkan manfaat yang dirasakan adanya penguatan motivasi untuk berprestasi dan beramal serta penambahan kulaitas watak kepribadian, keilmuan dan profesionalitas. Untuk mengatasi gejala erosi idealisme dikalangan pemuda, HMI menempuh langkah antisipasi melalui penataan kultur organisasi yang tetap menghargai dan konsisten terhadap idealisme

(kekuasaan) cukup mempengaruhi. Kondisi ini berlaku pula dalam hal keberanian pemuda untuk mengajukan koreksi dan inisiatif meskipun sangat memprihatinkan dalam hal keberanian menanggung resiko.

HMI menilai keterbukaan sebagai faktor yang harus ada dalam setiap OKP dalam rangka merangsang dan mentradisikan budaya yang demokratis dan bertanggung jawab, sebab keterbukaan berarti kebebasan dan penghargaan. Untuk mengimplementasikan nilai keterbukaan dalam OKP perlu ditempuh langkah-langkah berikut: (1) membiasakan untuk berbeda pendapat/diskusi secara bebas; (2) keterbukaan dalam setiap musyawarah anggota ; dan (3) training-training yang merangsang sikap terbuka. Sebagai instrumen kontrol sosial, keterbukaan menunjang kepemimpinan OKP. Di HMI sendiri mekanisme kepemimpinan diorganisir sedemikian rupa sehingga cukup terbuka sepanjang berkaitan dengan etika dan moral. Sehingga menyangkut implementasi nilai keterbukaan dalam tubuh HMI tidak ada masalah.

Satu contoh implementasi keterbukaan dalam pengambilan keputusan tercermin dari langkah-langkah berikut : (1) identifikasi masalah; (2) pengembangan alternatif (musyawarah); (3) analisis kekurangan dan

kelebihan pada setiap alternatif dan (4) penyimpulan dan pengambilan keputusan. Selain menempuh langkah-langkah tadi, pengambilan keputusan pun didasarkan pada AD/ART organisasi, keputusan kongres, independensi kemaslahatan dan nilai-nilai normatif lainnya. Keputusan akhir dinilai berdasarkan kriteria konstitusi (AD/ART), prosedural, material dan etika.

Keteladanan merupakan sikap yang paling mendasar yang harus ditampilkan pemuda. Bagi HMI, keteladanan adalah sikap utama yang perlu dikedepankan dalam rangka dakwah, penguatan akan hal-hal yang bersifat positif dan perlu diikuti orang lain. Bagi pemuda nilai ini bersumber dari integritas kepribadian, intelektualitas dan kepemimpinan. Suatu perilaku layak diteladani bila ia menampilkan komitmen akan nilai luhur, cerdas, kritis, inovatif dan positif, terbuka dan demokratis serta berpandangan jauh kedepan dan maju. Sedangkan kondisi eksternal yang dinilai mempengaruhi pasang-surutnya nilai ini adalah pejabat negara disamping kondisi masyarakat secara keseluruhan. Bagi HMI. Nilai-nilai ajaran Islam, intelektualitas dan dinamika generasi muda dinilai sebagai potensi pengembangan nilai ini, sedangkan yang menjadi kendalanya antara lain kultur sosial masyarakat yang belum

sepenuhnya mendukung.

Berkenaan dengan nilai inovatif dalam kepemimpinan OKP, HMI berpendapat bahwa nilai inovatif mengarah pada perubahan dan kemajuan secara positif. Dalam kehidupan OKP nilai ini terwujud dalam sikap kritik langsung (saran) maupun dengan menyelenggarakan diskusi-diskusi maupun forum ilmiah lainnya. Di dalam tubuh HMI, ajaran Islam tentang pentingnya inovasi, karakter insan akademik dan potensi generasi muda merupakan faktor-faktor pendorong pembinaan nilai-nilai ini. Sedangkan faktor-faktor yang dirasakan sebagai penghambatnya adalah kultur masyarakat yang masih belum terbuka atas gagasan inovatif.

Sedangkan menyangkut kreativitas, HMI berpendapat bahwa nilai ini berkenaan dengan sikap yang mampu melahirkan suatu karya, baik secara langsung maupun tidak, mampu memberikan andil positif terhadap pengembangan organisasi. Beberapa hal yang mendorong pengembangan nilai ini antara lain kebebasan berfikir, berpendapat dan bekerja saling menghargai dan keterbukaan. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain berbentuk pengekanan ketertutupan dan budaya feodal. Untuk memupuk kreatifitas pemuda perlu ditempuh langkah-langkah berikut: (1) memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk berbicara dan

mengemukakan pendapat ; (2) menghargai kreasi apapun yang pernah ada; dan (3) memotivasi untuk berkreasi.

Mengenai etos kerja dalam kepemimpinan OKP, HMI berpendapat bahwa nilai ini berkaitan dengan motivasi dan semangat seseorang untuk bekerja dan mengabdikan demi kemajuan organisasi. Menilai kondisi umum etos kerja pemuda dewasa ini HMI berpendapat sangat pragmatis, namun dalam tubuh HMI, kondisi nilai ini relatif cukup baik mengingat motivasinya jelas, yaitu ibadah. Nilai ini bisa dikembangkan dengan memanfaatkan faktor-faktor pendorong antara lain :

1. Nilai-nilai yang dianut dan dipraktikkan
2. Soledaritas
3. Kompetisi dan penghargaan
4. Kebebasan berpendapat
5. Kebebasan mengembangkan ide dan gagasan

Adapun faktor-faktor yang dirasakan menghambat perkembangan nilai ini adalah individualisme, pengekangan, feodalisme, dan formalisme. Untuk meningkatkan nilai ini perlu diusahakan langkah-langkah berikut :

1. Penguatan ide atau gagasan
2. Menumbuhkan persaingan yang sehat
3. Memberikan keleluasaan bekerja

4. Memperkuat bekerjasama dan penguatan nilai

Aspek lain yang tak kalah pentingnya dalam membina kepeloporan kepemimpinan pemuda adalah mobilitas, keuletan, percaya diri dan ketangguhan. Mobilitas adalah kemampuan seorang pemimpin dalam menggerakkan kepemimpinan secara dinamis, exeleratif, efektif, terutama dalam mengorganisasi dan berhubungan secara eksternal. Fungsi peran OKP sebagai alat mobilitas sosial harus diartikan sebagai proses pembinaan kepemimpinan bangsa (vertikal) dan bersama-sama masyarakat membangun dan menyampaikan aspirasi (horisontal). Unsur-unsur pokok yang menjadi pendukung mobilitas OKP antara lain ide/gagasan, proses organisasi atau kepemimpinan, kaderisasi, hubungan dengan lingkungan/organisasi eksternal dan faktor lain yang bisa membangkitkan dinamika organisasi.

Nilai keuletan merupakan kemampuan seseorang pemimpin dalam menekuni tugas yang diembannya sebagai bukti tanggung jawab dan profesionalismenya. Kondisi keuletan pemuda saat ini pada umumnya sangat minim. Hal ini dikarrenakan semakin menggejalanya budaya jalan pintas, kolusi, korupsi, pragmatisme sempit dan inkonsistensi. Oleh karena itu, pemupukan konsistensi merupakan usaha-usaha penting dalam rangka membangkitkan

keuletan pemuda.

Demikian pula halnya dengan percaya diri yang dipandang sebagai sikap bahwa ia mampu melaksanakan tugas organisasi bersama-sama personalia lainnya. Di HMI kondisi percaya diri cukup baik. Hal ini tercermin dari optimismenya dalam melaksanakan program-program kerja.

Sedangkan ketangguhan merupakan kemampuan dan ketahanan yang dimiliki pemuda dalam menghadapi tantangan dan masalah. Kondisi ini secara umum sangat memprihatinkan, seperti nampak dalam kemampuan memecahkan masalah, apatis dan kengangan menanggung resiko. Bahkan sebaliknya, keputusan relatif cukup mewarnai kehidupan pemuda saat ini.

Menanggapi keberadaan OKP, baik dilihat dari Undang-undang No. 8 tahun 1985, kelembagaan maupun dari lingkungan sosial, HMI, berpandangan sebagai berikut.

Dilihat dari UU no. 8 tahun 1985, OKP bertujuan membina anggotanya agar menjadi pribadi, anggota masyarakat dan warga negara yang baik disamping membina sikap, keteladanan, kepemimpinan, dan sikap-sikap positif lainnya bagi kemajuan bangsa. Dengan sasaran membina generasi muda sebagai warga negara yang baik serta mempersiapkan calon-calon pemimpin bangsa yang bertanggung

jawab dimasa depan.

Pancasila dan UUD 1945 menjadi landasan umum OKP. Sedangkan yang menjadi landasan khususnya adalah disesuaikan dengan latar belakang historis OKP yang bersangkutan disamping sesuai dengan status dan sifatnya. Di HMI misalnya, kekhususan tersebut dimensinya Islami. Berdasarkan landasan ini, asas dan arah OKP dirumuskan. Di HMI misalnya, asasnya ditegaskan sebagai organisasi yang beridentitas Islam dengan arah membina insan akademis yang berjiwa Islam, bertanggung jawab masyarakat adil dan makmur. Sedangkan mekanisme kerjanya adalah sistem aturan organisasi yang merupakan tata aturan bagaimana seharusnya roda organisasi dijalankan.

Berkenaan dengan mekanisme pelaksanaan program OKP di HMI diusahakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Kongres/konferensi/rapat anggota menetapkan program kerja
2. Rapat kerja menjabarkan ketetapan kedalam bentuk program kerja yang operasional
3. Rapat presidium menyiapkan kerja organisasi tiap minggu
4. Evaluasi melalui rapat harian/pleno terhadap pelaksanaan program.

Menyangkut implementasi undang-undang ini dinilai HMI

memiliki beberapa potensi. Antara lain independensi OKP, pedoman perkaderan, kesamaan asas, pedoman hubungan kemasyarakatan dengan pemerintah. Sedangkan faktor-faktor yang dinilai sebagai kendalanya antara lain intervensi pemerintah yang berlebihan, walaupun hal ini tidak terjadi di tubuh HMI.

Sedangkan dilihat dari sudut kelembagaan. Keberadaan OKP memiliki potensi dan kendala yang berbeda. Di HMI sejumlah potensi yang dimiliki antara lain potensi generasi muda, intelektualitas, perkaderan yang mapan, latar belakang sejarah dan dukungan alumni. Sedangkan faktor-faktor yang dinilai menjadi kendala antara lain status organisasi mahasiswa yang terbatas, baik keanggotaannya maupun waktu yang luang, disamping keterbatasan dana dan fasilitas.

Adapun jika dilihat dari lingkungan sosial, potensi yang dimiliki antara lain budaya bangsa yang mayoritas muslim, budaya ilmiah perguruan tinggi, budaya generasi muda, dan lingkungan supra struktur. Sedangkan yang menjadi kendalanya antara lain sikap feodal aparat pemerintah, disamping tatanan budaya politik yang belum terjabarkan betul dalam mekanisme pemerintahan.

1.5. Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia

(Janhotman, dkk)

(Hasil Wawancara)

Pancasila menjadi filosofi pendidikan politik dalam tubuh PMKRI. Hal ini antara lain karena kepekat^yan budaya dimana nilai-nilai budaya yang ada tidak boleh berbenturan dengan dasar filosofis negara Pancasila. Karena Pancasila merupakan puncak nilai budaya bangsa yang ada. Secara singkat, akar nilai budaya bangsa harus tersubordinasi dalam filosofi negara.

Pendidikan politik penting artinya karena tujuan yang ingin dicapainya, yaitu: (1) membangun pemikiran politik dalam rangka meningkatkan kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) mengembangkan wawasan kebangsaan; dan (3) membangun idealisme perjuangan dalam kerangka filosofis politik dan budaya bangsa.

Sedangkan bagi OKP, pendidikan politik secara khusus bertujuan: (1) meningkatkan partisipasi politik generasi muda sehingga sosialisasi gagasan politik meluas ke lapisan masyarakat bawah; (2) memberi kesadaran bagi generasi muda bahwa kebudayaan politik harus dijalankan dalam perspektif rakyat sebagai pemegang kedaulatan bukan

hanya kelompok elit tertentu; dan (3) menyadarkan generasi muda akan hak-hak politiknya serta tanggung jawab sosialnya. Tujuan ini dirumuskan dalam bentuk: (1) sosialisasi gagasan berupa tawaran pemikiran, baik berupa statement politik maupun dialog dengan lembaga-lembaga terkait; (2) pertemuan atau diskusi sosial kemasyarakatan; dan (3) kegiatan karikatif atau aksi sosial; dan (4) kaderisasi dalam jenjang pendidikan dan pembinaan.

Berdasarkan tujuan tadi, maka pendidikan politik yang dijalankan OKP memuat materi ; (1) nasionalisme, budaya bangsa; (2) konsep kedaulatan rakyat; (3) Indonesia sebagai negara hukum; (4) undang-undang pembangunan politik; (5) kesadaran bela negara; (6) sishankamrata/dwi fungsi ABRI; dan (7) kelompok-kelompok strategis dalam masyarakat. Dalam prosesnya materi tersebut disajikan melalui kegiatan kaderisasi baik formal maupun informal dan dialog-dialog kritis dalam berbagai pertemuan ilmiah.

Jika dilihat dari UUSPN No.2/89 wujud pendidikan politik menjadi tidak jelas. Hal ini antara lain akibat depolitisasi sekolah dan perguruan tinggi. Akibatnya sasaran pendidikan politik menjadi tidak jelas pula.

Sedangkan jika dilihat dari Inpres No. 12/1982 pendidikan politik memiliki target meningkatkan pemahaman

terhadap realitas sosial dan menumbuhkan tanggung jawab terhadap lingkungan sehingga timbul rasa solidaritas sesama warga. Untuk mencapai sasaran ini materinya dirancang bagi pengembangan kesadaran dan wawasan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Adapun nilai politik yang harus dikembangkan adalah nilai demokratisasi atas dasar pluralisme.

Selain dilihat dari ketiga sisi di atas, esensi pendidikan politik bisa dipandang dari esensi pengembangan generasi muda. Menurut PMKRI, batas usia peserta pendidikan politik setara dengan usia mahasiswa (strata satu). Pada pelaksanaannya, pendidikan difokuskan ke arah pembangunan intelektual yang kritis, bukan "textbook thinking". Artinya kesempatan mengekspresikan kemampuan pemikiran harus terbuka luas.

Perguruan tinggi, organisasi politik, lembaga-lembaga keagamaan maupun keluarga merupakan media yang dapat digunakan dalam pengembangan generasi muda. Proses ini dijalankan dengan target meningkatkan kesadaran kritis agar memiliki tingkat solidaritas antar sesama demi usaha-usaha mengarahkan bangunan sosial dalam suatu tatanan yang bermasyarakat.

Kepeloporan OKP merupakan masalah menarik dalam

perkembangan OKP pada saat-saat sekarang. Di tengah-tengah ketergantungan yang semakin menguat, justru dibutuhkan kepeloporan sehingga OKP tidak kehilangan identitasnya.

Asas kebangsaan sebagai elemen penting kepeloporan OKP harus bertumpu pada pluralisme demi demokrasi. Artinya asas kebangsaan tidak boleh bergeser dari prinsipnya, yaitu kerakyatan dan kemanusiaan. Hanya dengan pemahaman atas prinsip inilah ketahanan nasional akan terwujud dengan nyata. Dalam prakteknya, seringkali asas kebangsaan dalam OKP terlalu dimanipulasi secara eupemistik demi kepentingan primordial.

Sementara asas kejuangan, saat ini dipahami sebagai "pertimbangan untung rugi". Untuk itu nilai kejuangan pemuda perlu diwujudkan dalam bentuk penjernihan segala bentuk yang bertujuan menindas hak-hak rakyat. Namun perbedaan pemahaman dan kepentingan menjadi kendala dalam pengembangan nilai ini. Di sisi lain kemampuan berfikir dan semangat merupakan faktor pendukung yang perlu dioptimalkan dalam pembinaan nilai kejuangan ini.

Sedangkan nilai idealisme sesungguhnya telah bervariasi, karena tergantung pada kemampuan melihat persoalan-persoalan nyata dalam masyarakat. Rasa memiliki pemuda terhadap OKP sangat tinggi seperti diwujudkan dalam

berbagai tindakan yang beragam. Untuk menanggulangi kondisi idealisme generasi muda yang kian kritis, OKP perlu melakukan terobosan antara lain dengan pengembangan visi dalam tindakan nyata.

Nilai lain yang tak kalah pentingnya adalah patriotisme. Patriotisme merupakan perwujudan sikap atas dasar falsafah hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manifestasinya diukur dari keterlibatan sosial. Dalam realitanya, keberadaan nilai ini diragukan, seperti halnya dalam keikhlasan dan tanggung jawab. Hal ini akibat inkonsistensi dalam mewujudkan eksistensinya sebagai pemuda khususnya dalam menentukan keselamatan bangsa.

Berkaitan dengan keterbukaan, menurut PMKRI asas ini harus didasari prinsip pembangunan logika yang konstruktif, sehingga terjalin suatu solidaritas sikap dan pemikiran demi tujuan yang akan dicapai. Untuk mengimplementasikan asas ini dialog kritis sangat dibutuhkan. Akibat kurangterbukaan selama ini mengakibatkan kontrol sosial kurang terkatualisasikan secara nyata, seperti yang nampak dalam hal komunikasi antar etnis yang masih memerlukan pembinaan.

Bagi PMKRI aspirasi anggota merupakan landasan utama dalam mekanisme pengambilan keputusan. Landasan ini

dikembangkan dengan sistem musyawarah-mufakat yang berdasarkan pada " arus bawah " anggota sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Untuk menilai efektivitas pelaksanaan keputusan dilakukan dengan melihat dampaknya bagi organisasi.

Keteladanan sebagai salah satu aspek kepeloporan merupakan sikap dan pemikiran yang mampu dipertanggungjawabkan. Keteladanan bersumber dari intelegensi, nilai budaya maupun nilai religius. Saling menghargai dan solidaritas merupakan perilaku yang mengarah pada keteladanan. Namun keteladanan sangat fluktuatif, ia sangat dipengaruhi oleh nilai budaya, perkembangan IPTEK maupun saluran informasi yang semakin ekstensif.

Inovasi sebagai ciri kepeloporan OKP perlu dikembangkan atas dasar pengoptimalan kepemimpinan partisipatif. Beberapa kondisi yang mampu mendorong peningkatan inovasi OKP antara lain kaderisasi secara kontinu, pembinaan informal, kompetitif, dan perubahan secara terus-menerus ke arah tatanan konstitutif. Sedangkan faktor-faktor yang dirasakan menjadi penghambat dalam pembinaan inovasi antara lain: (1) tingkat pemahaman yang berbeda; (2) informasi yang tidak memadai; (3) sistem

yang tidak objektif; (4) alergi terhadap nilai-nilai eksternal; dan (5) kepemimpinan yang cenderung otokrasi.

Seperti halnya inovasi, kreativitas merupakan faktor penting dalam kepemimpinan OKP. Pembinaan potensi ini harus didasarkan pada keunggulan empirik dan teoritik. Beberapa faktor yang menjadi pendorong munculnya kreativitas pemuda dalam kepemimpinan OKP antara lain: (1) intelektualitas; (2) nilai budaya; (3) semangat perubahan; (4) limpahan informasi. Sedangkan faktor-faktor yang dirasakan menghambat antara lain kurangnya pemahaman disamping adanya kecenderungan menampilkan atribut-atribut kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, sosialisasi gagasan melalui dialog kritis sangat dibutuhkan dalam mengatasi gejala ini.

Etos kerja dalam tubuh OKP sangat bergantung kepada kesuburan dan kemiskinan personal. Menyinggung etos kerja pemuda dewasa ini, PMKRI berpendapat kurang baik. Hal ini antara lain disebabkan oleh kurangnya kesadaran, kurangnya pemahaman sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap lingkungannya di samping yang kurang objektif. Sementara faktor-faktor yang dinilai mendorong munculnya etos kerja antara lain; peningkatan kesadaran, menyadari eksistensi sebagai generasi muda yang harus bertanggung jawab

terhadap lingkungan, di samping adanya pembenahan sistem secara terus menerus.

Mobilitas adalah kemampuan untuk menggerakkan ide menjadi dasar pemahaman dan tindakan. OKP masih dinilai cukup berperan sebagai sarana mobilitas sosial. Namun peranan aktifis sebagai penjaga mobilitas OKP dinilai kurang efektif.

Sementara keuletan, percaya diri dan ketangguhan merupakan tiga konsep yang dinilai sangat bertautan erat. Ketiganya menunjukkan peningkatan dalam penampilan OKP dalam kesehariannya. Namun potensi-potensi memerlukan pembinaan sebab dalam prakteknya sangat mudah dipengaruhi oleh kondisi eksternal, disamping kekurangmampuan potensi internal.

Menyinggung keberadaan OKP, baik dilihat dari UU No. 8 tahun 1985, kelembagaan maupun dari sudut lingkungan sosial terungkap hal-hal sebagai berikut.

Menurut UU No. 8/85 OKP bertujuan menumbuhkan kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam upaya mewujudkan tujuan nasional. Sasarannya, secara umum adalah mengembangkan potensi OKP yang ada dalam organisasi untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang berorientasi pada pembangunan sikap, penilaian dan

pemikiran kritis terhadap permasalahan pembangunan yang ada. Adapun sasaran khususnya antara lain; menciptakan kader yang tangguh dan tahu akan kekuatan dan keadilan atas dasar Pancasila, di samping memberikan sumbangan nyata untuk meningkatkan kehidupan lingkungan masyarakat yang masih tertindas.

Pancasila merupakan landasan OKP. Sedangkan landasan khususnya tergantung pada konstitusi UUD 1945 serta landasan yuridis AD/ART.

Asas dalam OKP harus menjadi titik tolak OKP dalam merumuskan kebijakan-kebijakannya. Sebab dalam artian khusus, asas sebuah OKP merupakan sikap batin yang muncul dari dalam organisasi sedangkan arah OKP merupakan tujuan yang hendak dicapai sehubungan dengan pembentukan OKP.

Mekanisme kerja OKP dirumuskan dalam AD/ART tersebut atau dalam aturan organisasi tersebut. Dalam pengambilan keputusan misalnya, langkah-langkah yang ditempuh antara lain mengumpulkan informasi, menampung segala usul dan mengambil keputusan. Sedangkan mekanisme pelaksanaannya dirumuskan bersama-sama antara penguasa dan anggota. Dilihat dari aplikasinya, OKP dinilai memiliki potensi karena pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, disamping sumber daya yang lain. Sedangkan kendalanya

antara lain kurangnya orientasi pembinaan dan pendidikan para anggota.

Jika dilihat dari kelembagaan OKP memiliki potensi pemikiran, kreativitas dan idealisme pemuda. Sementara pemikiran para anggota dinilai potensi paling mendukung. Sementara yang dinilai sebagai kendalanya adalah pengaruh pemerintah di samping dukungan sarana dan prasarana.

Sedangkan jika dilihat dari segi lingkungan sosial keberadaan OKP dinilai memiliki potensi yakni pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sedangkan yang dinilai sebagai kendalanya adalah sikap masyarakat yang utopis terhadap keberadaan OKP beserta fungsi-fungsinya.

1.6. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia

(Ikhsan R Hartono, dkk)

(Hasil Wawancara)

Proses pendidikan politik yang diselenggarakan melalui Gerakan Mahasiswa Nasionalis Indonesia (GMNI) dilandasi filosofi bahwa manusia sebagai zoon politicon, pasti hidup dalam suatu wilayah yang disebut negara dirasakan harus mampu mengetahui bagaimana ia dapat hidup dalam suatu negara. Filosofi ini amat sulit dipisahkan dari akar budaya bangsa, yang bisa dilakukan bukan menarik perbedaan antara filosofi pendidikan politik dengan akar budaya bangsa, melainkan hanya membuat periodisasi sejarah antara pra sejarah, sejarah dan konsep negara modern.

Pendidikan politik yang dilakukan bertujuan untuk menjelaskan bagaimana hak-hak dan kewajiban dalam suatu organisasi yang disebut negara dapat berjalan demi kemakmuran bersama. Sedangkan bagi OKP, pendidikan bertujuan selain membina pemuda sebagai generasi penerus juga agar OKP mampu berperan dan memberikan kontribusi dalam proses pembangunan. Tujuan ini biasanya dirumuskan dalam program kerja, hubungan kerjasama maupun pembahasan

masalah. Untuk mencapai tujuan ini, materi pendidikan politik seharusnya memuat kajian tentang Pancasila dalam perpektif sejarah, sistem politik Indonesia, budaya politik Indonesia dan demokrasi. Sedangkan kegiatan yang dapat menunjang tujuan ini antara lain :

1. Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen oleh semua pihak
2. Memacu tumbuhnya demokratisasi dan HAM oleh semua pihak.

Dilihat dari Inpres No. 12 tahun 1982, target yang hendak dicapai adalah mencapai kehidupan yang demokratis, tercapainya kedaulatan rakyat dan agar semua mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara. Untuk mencapai target ini materi yang dinilai penting adalah demokratisasi. Selain itu pendidikan politik harus memancarkan nilai-nilai budaya politik wawasan kerakyatan; jiwa kepemimpinan dan ideologi.

Dilihat dari esensi pengembangan generasi muda, batasan usia peserta pendidikan politik tidak bisa ditentukan secara pasti, tetapi biasanya berkisar antara 20-30 tahun. Dari sudut ini, pendidikan politik harus mengutamakan bagaimana sebetulnya pemuda bisa mandiri mempunyai sikap tanpa harus selalu didikte bahwa pemuda

harus selalu dibimbing dan diarahkan.

Pola ini menggunakan media elektronik dan cetak, selain diharapkan target pendidikan membina kemandirian, sikap serta menanamkan kesadaran sejarah bangsa dapat terwujud.

Kepeloporan OKP merupakan faktor determinan bagi pembinaan generasi muda melalui tubuh organisasi kepemudaan. Pemahaman yang baik tentang asas-asas yang menunjang nilai kepeloporan merupakan aspek penting dalam pembinaan kepeloporan OKP.

Asas kebangsaan berkaitan dengan pemahaman tentang demokrasi, keadilan sosial, religi serta budaya bangsa. Asas ini dinilai sudah tidak ada masalah untuk saat sekarang, selain asas kebangsaan, asas kejuangan merupakan faktor lain yang menjadi faktor penting dalam pengembangan kepeloporan OKP.

Nilai kejuangan identik dengan pencapaian kebenaran/tujuan yang luhur dalam perjuangan. Nilai ini pula yang membuat suatu OKP berbeda dari OKP lainnya. Nilai ini diwujudkan dalam bentuk pemikiran, pandangan dan tujuan. Kendala yang dihadapi OKP dalam mengembangkan nilai ini antara lain kendala intern OKP seperti persoalan dana, disamping kendala sistem seolah-olah pemuda ingin

dikebiri dan dipendam. Sedangkan faktor-faktor yang dinilai mendukung pengembangan nilai ini antara lain kaderisasi, motivasi dan kesadaran.

Berkenaan dengan kondisi idealisme pemuda saat ini, GMNI menilai sulit hidup menutup mata terhadap kondisi keseluruhan dimana sudah cenderung apatis, fragmatis dan oportunistis. Oleh karena itu, sedikit sekali pemuda yang menganggap dan menjadikan OKP sebagai wadah untuk berproses dan berjuang, melainkan hanya dipandang sebagai tempat berkumpul, atau bahkan bermain. Untuk mengatasi kondisi ini OKP harus mengambil tindakan terobosan dengan menjalankan amanat konstitusinya, baik program, independensi maupun kepedulian terhadap persoalan-persoalan bangsa.

Adapun patriotisme dipahami sebagai suatu sikap yang berani dalam membela yang benar demi kepentingan yang sama tanpa pamrih. Menilai kondisi keberanian pemuda dalam hal membela kebenaran dan keadilan, GMNI berpendapat hanya sedikit pemuda yang berani membela kebenaran dan keadilan dalam konteks kehidupan bernegara, selebihnya telah terpengaruh oleh ketakutan yang diciptakan oleh rezim yang berkuasa. Demikian pula dalam hal kondisi pemuda dalam hal keterlibatan menentukan keselamatan bangsa tidak ada

masalah dalam OKP yang independen. Hal ini mungkin berbeda dengan OKP yang telah hegemonik dengan kekuasaan, atau OKP pemerintah, seperti KNPI, mereka harus berhati-hati dalam mengeluarkan gagasannya.

Dalam hal disiplin, kondisi pemuda tidak berbeda dengan kondisi masyarakat pada umumnya yang masih memiliki tingkat kedisiplinan yang rendah. Berkenaan dengan keberanian pemuda dalam mengembangkan gagasan dalam OKP dinilai tidak ada masalah dalam OKP yang independen, hal ini mungkin berbeda dengan OKP yang "intim" dengan pemerintah. Hal serupa berlaku pula untuk pengambilan keputusan. Demikian pula halnya dengan keberanian mengajukan koreksi, dengan pertimbangan keselamatan OKP masing-masing.

Keterbukaan dalam persepsi GMNI dipahami sebagai kondisi dimana kehidupan demokrasi menjadi lebih demokratis dalam segala aspek kehiduapn. Dengan kata lain melalui keterbukaan akan lebih menampakan diri sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat dan berdasarkan hukum. Untuk mengimplementasikan nilai ini dalam OKP dibutuhkan program-program yang sifatnya mengandung pembahasan masalah bersama. Berkenaan dengan dampak iklim keterbukaan terhadap sportivitas OKP, GMNI menilai secara

umum berdampak yang ditandai dengan semakin kritisnya OKP, walaupun dampak ini diakui tidak begitu transparan.

Menyangkut proses pengambilan keputusan, GMNI mengungkapkan bahwa langkah-langkah tersebut dimulai dengan pembicaraan bersama (musyawarah) untuk kemudian diputuskan secara bersama-sama. Dalam teknisnya, hal ini disesuaikan dengan prosedur yang berlaku dimasing-masing organisasi. Sedangkan yang menjadi acuannya adalah tujuan didirikannya organisasi, asas dan motto GMNI yang dijabarkan didalam anggaran dasar dan rumah tangga. Oleh karena itu, kriteria yang digunakan didalam menilai keputusan berpijak pada tujuan, AD/ART dan jalannya musyawarah.

Aspek lain yang sangat penting dalam pembinaan kepeloporan pemuda adalah keteladanan. Keteladanan adalah suatu sikap yang dapat dicontoh dan diikuti karena kebaikan-kebaikannya. Keberanian membela dan berpihak pada kebenaran, berwawasan luas dan berjiwa pemimpin dinilai sebagai faktor-faktor keteladanan pemuda dalam OKP. Untuk menilai apakah prilaku layak dijadikan teladan atau tidak, sekurang-kurangnya harus berpegang pada disiplin, berjiwa pemimpin, suka menolong dan berwawasan. Dipihak lain, keteladanan sangat dipengaruhi oleh kondisi sistem yang

dapat mempengaruhi kemandirian dan kondisi budaya yang dapat mempengaruhi eksistensi pemuda.

Sikap inovatif merupakan pemikiran-pemikiran yang maju di mana pemikiran tersebut mencerminkan suatu pemikiran yang membawa nilai-nilai perubahan yang baru. Didalam OKP, sikap ini diaktualisasikan dengan cara berpikir kritis, terus ikut berproses untuk lebih mewujudkan identitas dan meningkatkan kepekaan sosial. Untuk menumbuhkan sikap ini perlu diciptakan iklim yang mendukung, yakni iklim dialogis, budaya ilmiah dan keterbukaan. sedangkan yang menjadi penghambatnya antara lain sumberdaya manusia, kepentingan dan dana.

Kreatifitas merupakan sikap lain yang tidak jauh berbeda dengan inovatif. Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengadakan kegiatan yang bermanfaat serta tanggap terhadap permasalahan sosial. Kondisi kreatifitas pemuda sekarang cukup bagus, jika dipandang dari sudut kepemimpinan OKP. Beberapa faktor yang menghambat munculnya kreativitas pemuda antara lain kendala intern OKP yang merugikan; intervensi pemerintah yang menyebabkan ketergantungan dan kecenderungan untuk memilih budaya mapan. Untuk mengatasi persoalan ini perlu ditempuh langkah-langkah yang dapat membangkitkan kreatifitas

generasi muda, antara lain : memacu prestasi, suka terhadap tantangan dan petualangan, serta menumbuhkan kehidupan yang demokratis.

Secara etos kerja dikonsepsikan sebagai kemauan, kedisiplinan dan semangat yang kuat dalam mencapai suatu tujuan bersama. Kondisi seperti ini masih dinilai kurang jika dilihat dari kedisiplinan dan semangat kerjanya. Beberapa faktor yang mendorong munculnya sikap ini antara lain kebersamaan, kepentingan bersama serta sarana dan prasarana. sedangkan faktor-faktor penghambatnya antara lain sarana yang belum memadai, aturan main organisasi yang belum dapat ditegakkan sepenuhnya disamping motivasi memasuki OKP yang tidak jelas. Oleh karena itu perlu langkah-langkah dalam meningkatkan etos kerja pemuda dalam OKP melalui pembinaan kesadaran akan tujuan memasuki OKP, memperkuat konsolidasi dan menyediakan sarana untuk OKP.

Aspek mobilitas dalam kepemimpinan OKP merupakan kebersamaan dan kesungguhan bersama untuk mencapai tujuan bersama. OKP sebagai alat mobilitas sosial dimana umumnya justru karena OKP yang menyuarakan kepentingan masyarakat, di samping OKP sebagai organisasi kelas menengah yang mampu menjembatani antara "atas" dan "bawah". Aspek ini lebih banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur konsolidasi yang

mantap, pencapaian sasaran dan tujuan yang jelas.

Nilai keuletan atau kegigihan/semangat yang dimiliki untuk melaksanakan suatu pekerjaan demi tujuan bersama adalah aspek lain yang tak kalah pentingnya. Kondisi keuletan pemuda, khususnya aktifis, sudah bagus. Mereka tidak pernah menyerah walaupun negara semakin refresif. Untuk membina nilai ini perlu ditumbuhkan nilai-nilai yang mendorong antara lain motivasi yang kuat, keyakinan akan kemampuan sendiri. Sedangkan faktor-faktor yang merintanginya antara lain budaya nepotisme, mengambil jalan pintas maupun motivasi rendah. Boleh jadi kondisi ini sebagai akibat kondisi percaya diri pemuda yang belum begitu menggembirakan. walaupun keadaan dikalangan aktifis tidak seburuk dikalangan pemuda pada umumnya.

Percaya diri merupakan sifat yang harus dimiliki oleh fungsionaris OKP karena ditangannyalah organisasi akan dikemukakan, jika fungsionaris mengalami krisis percaya diri maka eksistensi OKP akan jatuh. Sementara kondisi rasa percaya diri dalam hal keyakinan akan keberhasilan membina organisasi kemasyarakatan pemuda cukup bagus, antara lain diperlihatkan dengan : (1) keyakinan dan kemampuan dan wawasannya; (2) Keyakinan akan kesempatan yang ada; dan (3) Mempunyai rasa tanggung

jawab moral yang tinggi terhadap organisasi dan kepedulian yang tinggi. Kondisi ini akan nampak pula dalam keyakinan akan kemampuan sendiri.

Ketangguhan pemuda dalam kehidupan OKP merupakan cerminan jiwa yang tidak mudah putus asa dan memiliki kemampuan untuk mengaktualisasikan intelektualitas, juga kemampuan menganalisa berbagai persoalan secara teliti. sikap ini menampakan dirinya dalam hal kegigihan, ulet, memiliki idealisme maupun kritisisme dan kesabaran.

Menanggapi keberadaan OKP, baik dilihat dari UU Nomor 8/85, kelembagaan maupun dari lingkungan sosialnya GMNI mengungkapkan hal-hal berikut.

Dilihat dari UU Nomor 8/85 OKP bertujuan mengembangkan nilai-nilai menyangkut pencapaian cita-cita organisasi, seperti idealisme, perjuangan dan tujuan spesifik organisasi yang diabadikan untuk kepentingan bangsa. Adapun sasaran umumnya adalah ikut memecahkan persoalan di dalam masyarakat, menciptakan kader bangsa dengan kaderisasi yang diciptakan masing-masing OKP. Adapun sasaran khususnya adalah menciptakan jalur tertentu dalam kegiatan sosial politik.

OKP berdiri diatas landasan Pancasila. Sedangkan secara khusus, ia berdiri di atas nilai-nilai dasar

perjuangan masing-masing OKP. Selain landasan, OKP memiliki asas dan arah. Asas merupakan suatu pedoman sedangkan arah merupakan acuan atau tujuan kemana OKP akan digerakan. AD/ART, ikatan kebersamaan dan persepsi serta pemahaman ideologi yang sama merupakan asas dan arah OKP.

Sedangkan berkenaan dengan mekanisme kerja OKP, GMNI beranggapan sejalan dengan konstitusi yang dimilikinya. Dalam pengambilan keputusan misalnya, ada prosedur yang telah ditetapkan. Demikian pula mekanisme pelaksanaan program kerja OKP.

Dalam pembinaan OKP masalah yang sangat mengganggu adalah kelangkaan sarana dan prasarana. Selain itu, persoalan kaderisasipun sering muncul sebagai masalah krusial, disamping pola pembinaan oleh pemerintah yang tidak jelas.

Jika dilihat dari kelembagaannya, OKP memiliki sejumlah potensi dan kendala. diantara potensi tersebut adalah kesadaran anggota, keinginan anggota dan kebersamaannya. Sedangkan kendalanya antara lain kedisiplinan, pola pengembangan OKP yang tidak mengembangkan kemandirian OKP, disamping intervensi yang semakin menguat.

Dilihat dari lingkungan sosialnya, perbedaan OKP

bagus dilihat dari anggotanya yang berasal dari berbagai macam latar belakang dan pendidikan yang berbeda. Sedangkan faktor penghambatnya antara lain pluralisme yang ada, dan kesadaran anggota akan tujuan OKP maupun hubungan OKP dengan pemerintah yang mengakibatkan kemandirian OKP tidak berkembang.

